



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2016**



BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Kebijakan Perencanaan Provinsi Jawa Barat

Memasuki tahap kedua dari RPJP Jawa Barat tahun 2005-2025 yaitu RPJMD Tahun 2013-2018, merupakan tahap penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat, dimana untuk mencapainya dituangkan didalam Visi Provinsi Jawa Barat yaitu “ Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua ”, dan untuk mencapai visi tersebut dituangkan kedalam 5 Misi Jawa Barat, yang diusung untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis dan berkelanjutan
5. Mengokohkan kehidupan sosial, kemasyarakatan melalui peningkatan pemuda, olahraga, seni, dan budaya dalam bingkai kearifan lokal.

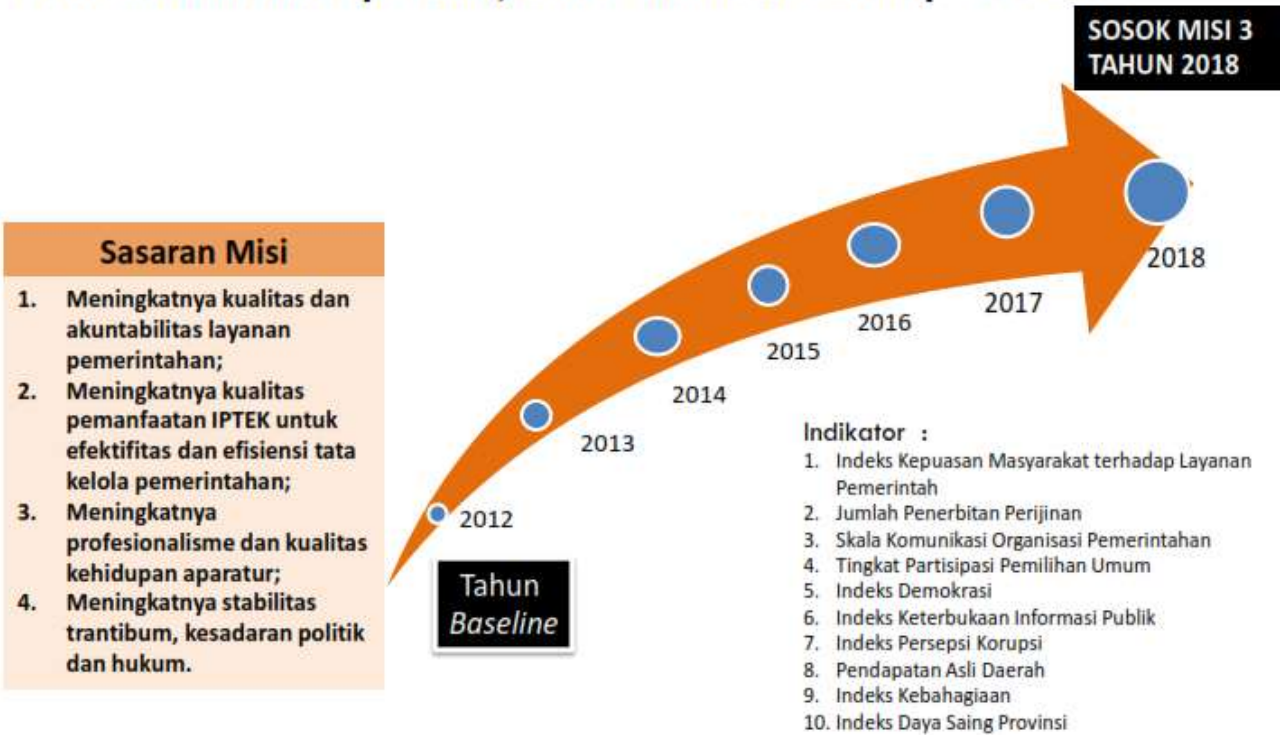
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat (BPMPD) didalam konstelasi regional Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melaksanakan **Misi Ketiga**, yaitu **Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMPD, maka prioritas pembangunan daerah melaksanakan *common goals* ke 9 yaitu **Pembangunan Perdesaan**.

Gambaran kebijakan perencanaan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada skema berikut ini.

POSISI PERENCANAAN DI DALAM RPJMD DAN RPJPD
PROVINSI JAWA BARAT

ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,
Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik



Sumber : Bahan ekspose Bappeda Indikator Kinerja RPJMD 2013-2018.

VISI DAN MISI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018		
1. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan a. Wajib belajar 12 tahun. b. Pendidikan Vokasional. c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan Inklusif. d. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. e. Terselenggaranya program pendidikan di luar domisili (PDD)/ Multikampus. f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan. g. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.	4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata a. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi. b. Meningkatkan jumlah serapan angkatan kerja. c. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian. d. Meningkatkan mutu, desain produk dan pemasaran usaha. e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya Lokal.	7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance). b. Meningkatkan kesadaran hukum. c. Menyelenggarakan pilkada yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia (LUBER) dan Jujur Adil (JURDIL).
2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. b. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). d. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan. e. Meningkatkan pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna.	5. Peningkatan ketahanan pangan a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai. b. Meningkatkan Distribusi, Informasi harga dan Akses Pangan. c. Terwujudnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. d. Meningkatkan kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh. e. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan.	8. Pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana a. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. b. Meningkatkan penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan. c. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah. d. Meningkatkan upaya penanganan pencemaran air di Hulu DAS Citarum. e. Meningkatkan kesiapan menghadapi bencana mulai dari mitigasi, penanganan bencana dan pasca bencana.
3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan a. Meningkatkan jumlah cakupan listrik rumah tangga. b. Meningkatkan jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi. c. Meningkatkan jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional. d. Meningkatkan jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan. e. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan. f. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur irigasi serta meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi.	6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri a. Meningkatkan akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang. c. Meningkatkan jumlah dan kualitas wirausahawan. d. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang.	9. Penanggulangan kemiskinan a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. b. Meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin/kelompok masyarakat miskin.
		10. Peningkatan penataan ruang daerah (F) a. Meningkatkan kualitas perencanaan ruang. b. Meningkatkan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. c. Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang.
		11. Peningkatan Kualitas kependudukan a. Meningkatkan ketahanan keluarga. b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan.

1.1.2 Pelaporan Akuntabilitas

Permasalahan mendasar dalam pembangunan daerah Jawa Barat saat ini yaitu masih terdapatnya penduduk miskin dan pengangguran, serta masih rendahnya daya beli masyarakat, sehingga upaya penanggulangannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan kewilayahan. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam skala nasional (tahun 2009) Jawa Barat menempati urutan ke tiga jumlah penduduk miskin sebesar 4,7 juta jiwa, setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi sebesar 4,485,654 atau sebesar 9,57 persen (sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2016). Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 Provinsi Jawa Barat sebesar 1.794.874 (sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2016).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Tahun 2013 adalah realisasi tahun pertama RPJMD 2013-2018, merupakan tahap penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat, dimana kebijakan pembangunan dan anggaran akan diupayakan dalam kerangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak diantara 5°50'1"-7°50'1" lintang selatan dan 104°48'-108°48' bujur timur. Jawa Barat memiliki lahan yang subur, sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian.

Secara administratif Jawa Barat dengan luas wilayah sebesar 371.164,54 Km² memiliki 27 Kabupaten dan Kota, yang terbagi dalam 18 kabupaten dan 9 kota, 625 kecamatan, 5.954 desa dan kelurahan yang terbagi dalam 5.316 desa dan 638 kelurahan. Jumlah penduduk Jawa Barat menurut sumber Jawa Barat Dalam Angka tahun 2015 sebesar 46,7 juta jiwa, laki-laki berjumlah 23,68 juta jiwa, perempuan berjumlah 23,03 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 1.264 jiwa/km². Dari total penduduk tersebut lebih dari 34,31 % diantaranya tinggal di perdesaan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, telah menjalankan rencana strategis yang telah disusun untuk tahun 2008-2013. Hal ini selaras dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013.

Sebagai pedoman pelaksanaan dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPMPD menyusun Rencana Strategis BPMPD tahun 2013 – 2018 yang merupakan landasan dan program bagi seluruh aparat BPMPD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang akuntabel, agar dapat terselenggaranya *Good Governance* BPMPD harus menyelesaikan visi, misi, dan rencana strategis secara baik dan benar sehingga program, kegiatan dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. **Akuntabilitas** *didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.* Maka merujuk pada Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPMPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan perlu melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada Renstra BPMPD 2008 - 2013 dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban BPMPD dalam mencapai misi dan tujuan organisasi BPMPD.

1.2 Dasar Hukum

1.2.1 Dasar Hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI No.3851).
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4741).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2.2 Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 No.126, Tambahan LNRI No. 4438).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LNRI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan LNRI No. 4587).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.20, Tambahan LNRI No.4816).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010.
7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025.

8. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 No.9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No.46)
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Seri E).
12. Keputusan MENPAN Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur.
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor Seri).
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor Seri A).
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.22.01.00.00.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 1.22.01.00.00.5 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Oktober 2016
18. Rencana Strategis BPMPD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. BPMPD Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok **Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.** Tugas pokok ini

tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa barat No.58 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
2. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
3. Penyelenggaraan Kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor.

BPMPD Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dibantu oleh Sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bidang. Pada sekretariat terdapat 3 sub Bagian yaitu Subbagian Perencanaan dan Program, Subbagian Kepegawaian dan Umum dan Subbagian Keuangan, adapun 4 Kepala Bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan Pengkajian bahan kebijakan teknis pemerintahan desa/kelurahan;
- 2) Menyelenggarakan Pengkajian bahan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Menyelenggarakan fasilitasi Administrasi dan pemerintahan desa/kelurahan.

Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan membawahi :

1. Subbidang Perangkat dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Subbidang Fasilitasi Pengembangan Desa.

2. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kajian teknis penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;

c. Penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat membawahi:

- 1) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
- 2) Subbidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
- 2) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
- 3) Menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa
- 4) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penanggulangan kemiskinan;

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat membawahi :

- 1) Subbidang Peningkatan Produksi, Mutu dan Pemasaran;
- 2) Subbidang Kelembagaan Keuangan.

4. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

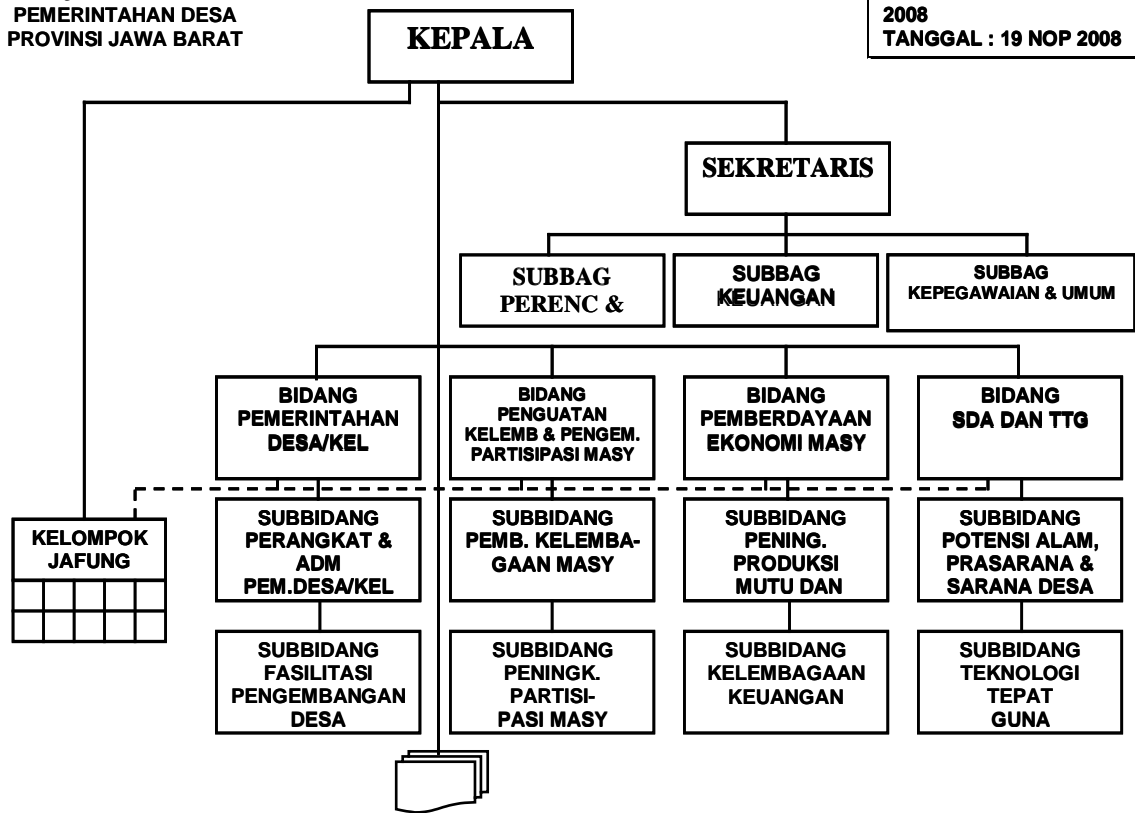
Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sumber daya alam, teknologi tepat guna desa terisolir, desa pesisir dan desa tertinggal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan Pengkajian bahan kebijakan teknis sumber daya alam, teknologi tepat guna, desa terisolir, desa pesisir dan desa tertinggal;
- 2) Menyelenggarakan Pengkajian bahan fasilitasi sumber daya alam, teknologi tepat guna, desa terisolir, desa pesisir dan desa tertinggal;
- 3) Menyelenggarakan fasilitasi bahan fasilitasi sumber daya alam, teknologi tepat guna, desa terisolir, desa pesisir dan desa tertinggal;

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi:

- 1) Subbidang Potensi Alam, Prasarana dan Sarana Desa/Kel;
- 2) Subbidang Teknologi Tepat Guna.



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Rencana Strategik Tahun 2013 - 2018
a. Visi dan Misi

BPMPD memiliki Visi : “**Pemerintahan desa yang profesional dan masyarakat yang mandiri untuk mewujudkan Jawa Barat maju dan sejahtera.**”

Dengan Visi BPMPD serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan BPMPD dapat terus berperan dinamis, komprehensif dan intuitif. Penjabaran makna dari Visi BPMPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintahan desa yang profesional: Terkandung makna bahwa BPMPD dengan tugas dan pokok dan fungsi yang dimilikinya mensinergikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat, maka berupaya untuk mewujudkan desa yang profesional, yaitu desa yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan manajemen yang kuat dan kepemimpinan yang kompeten pada desa yang dapat mendukung pembangunan Jawa Barat.

Masyarakat yang Mandiri : Mengandung esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya berbasis budaya. Kondisi ini sebagai kondisi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan Jawa Barat Maju dan Sejahtera.

Jawa Barat Maju dan Sejahtera : yakni suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat yang secara lahir dan bathin merasa aman dan makmur menjalani kehidupan. Kondisi ini terjadi dengan dukungan berupa :

- a. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat terutama diwilayah perdesaan.
- b. Pemantapan kelembagaan kehidupan sosial budaya dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat.
- c. Peningkatan pemanfaatan sumber alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.
- d. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan

Dalam rangka mencapai visi di atas, ditetapkan **5 (lima) misi BPMPD Provinsi Jawa Barat**, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kehidupan sosial budaya dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan.
3. Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan TTG.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa dan Kelurahan
5. Meningkatkan infrastruktur perdesaan

b. Strategi dan Kebijakan

Sedangkan untuk sasaran dan strategi dari tiap misi BPMPD Provinsi Jawa Barat, adalah :

Misi 1 :

“Meningkatkan kapasitas kelembagaan kehidupan sosial budaya, dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat”.

Sasaran :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Strategis yang dilakukan:

- a. Perumuan Kebijakan Kelembagaan Masyarakat
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kemasyarakatan
- c. Peningkatan Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

2. Meningkatnya Kondusifitas Kehidupan Sosial Budaya

Strategi yang dilakukan adalah :

- a. Peningkatan Pembinaan adat dan Budaya
- b. Revitalisasi Kelembagaan

3. Meningkatkan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan.
- b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Misi 2:

“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”

Sasaran :

1. Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sumber Ekonomi

Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Perdesaan
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lembaga Ekonomi Perdesaan

2. Meningkatkan Efektifitas Implementasi kebijakan Pengentasan Kemiskinan,

Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Perumusan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
- b. Peningkatan Sinergitas Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan

Misi 3 :

“Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam berwawasan Lingkungan dan Pendayagunaan TTG”.

Sasaran :

1. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

2. Meningkatkan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- b. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Misi 4 :

“Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan”

Sasaran :

1. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan
Strategi yang dilakukan adalah:
 - Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2. Meningkatnya Sarana Prasarana Pemerintahan
Strategi yang dilakukan adalah:
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa dan Kelurahan
3. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Desa
Strategi yang dilakukan adalah:
 - Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Bantuan Keuangan Desa

Misi 5 :

“Meningkatkan Infrastruktur perdesaan”

Sasaran:

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perdesaan

Strategi yang dilakukan:

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

c. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Tujuan : “Meningkatnya Tingkat Kemandirian Masyarakat dan Pemerintahan Desa”

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Kehidupan Sosial Budaya dan Pengembangan Partisipasi serta Keswadayaan Masyarakat”

- Indikator Sasaran :

1. Meningkatnya persentase Desa yang lembaga kemasyarakatannya berperan aktif.
2. Meningkatnya Persentase Desa yang melaksanakan gotong royong.
3. Meningkatnya Persentase Desa/Kelurahan yang peran serta masyarakatnya baik dalam pembangunan
4. Meningkatnya Persentase desa yang keswadayaannya meningkat sesuai target

Sasaran 2 : “Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber ekonomi”

- Indikator Sasaran :

1. Persentase desa yang telah mengakses permodalan usaha
2. Persentase desa yang telah mengakses pemasaran

Sasaran 3 : “Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna”

- Indikator Sasaran :

1. Persentase desa/kecamatan yang telah memiliki wartek/posyantek

2. Persentase desa yang telah memanfaatkan SDA berwawasan lingkungan

Sasaran 4 : “Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa/kelurahan”

- **Indikator Sasaran** :

1. Persentase desa yang aparaturnya memiliki kompetensi sesuai standar
2. Persentase desa yang memiliki kantor desa diatas tanah kas desa
3. Persentase desa yang lebih dari 50% APBDes digunakan untuk pembiayaan pembangunan

Sasaran 5 : “Meningkatnya infrastruktur perdesaan”

- **Indikator Sasaran** :

1. Persentase desa yang memiliki infrastruktur sudah baik.

2. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Kehidupan Sosial Budaya dan Pengembangan Partisipasi serta Keswadayaan Masyarakat	1. Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya berperan aktif	45 %
		2. Persentase Desa yang Melaksanakan Gotong Royong	47,08%
		3. Persentase Desa/Kelurahan yang peran serta masyarakatnya baik dalam pembangunan	51,30%
		4. Persentase Desa yang keswadayaannya meningkat sesuai target	64,99%
2.	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sumber Ekonomi	1. Persentase Desa yang BUMDesnya telah memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat	40%
		2. Persentase Desa yang memiliki Pasar Desa	55%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Persentase desa yang telah memiliki wartek	20%
		2. Persentase Desa yang telah memanfaatkan SDA berwawasan Lingkungan	20%
4.	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan	1. Persentase Desa yang aparaturnya memiliki kompetensi sesuai standar	30,60%
		2. Persentase Desa yang memiliki Kantor Desa di atas tanah kas desa	40,70%
		3. Persentase desa yang lebih dari 50%	40,70%

		APBDes digunakan untuk pembiayaan pembangunan	
5.	Meningkatnya Infrastruktur Perdesaan	Persentase Desa yang memiliki Infrastruktur Jalan Desa sudah baik	65%

3. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi BPMPD Provinsi Jawa Barat, maka perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Program yang sudah berjalan pada tahun 2016 adalah:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur.
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasana Aparatur.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
8. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
9. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
10. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.
11. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

- Kegiatan Tahun 2016

Kegiatan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Program dan Kegiatan BPMPD
2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPMPD
3. Pelayanan Administrasi kantor BPMPD
4. Peningkatan sarana dan prasarana kantor BPMPD
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor BPMPD
6. Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPMPD provinsi Jawa Barat
7. Penyusunan Dokumen Rencana, evaluasi dan pelaporan Internal BPMPD
8. Evaluasi dan Verifikasi Bantuan keuangan
9. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Posyandu di Desa dan kelurahan
10. Penguatan Lembaga Perekonomian Perdesaan.
11. Peningkatan Pemasaran Produk Perekonomian Perdesaan

12. Peningkatan peran serta masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
13. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa dan Kelurahan
14. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
15. Pengelolaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan (Standarisasi Pelatihan)
16. Sinkronisasi Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Perdesaan
17. Peran Kelembagaan Desa dalam perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Perdesaan.
18. Pembinaan Posyantek dan Wartek serta Gelar teknologi tepat guna Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat
20. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Tata Kelola Keuangan Desa (SIMKEUDES)
21. Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Profil Desa/Kelurahan
22. Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
23. Sinergitas Penguatan Peran Pemerintah Desa dan Gubernur Ngamumule Lembur (GNL)
24. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa
25. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

3. Anggaran Tahun 2016

Dalam Tahun Anggaran 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat memperoleh dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan bersumber dari APBN. Dana APBD Tahun 2016 untuk BPMPD yang tercantum didalam DPA Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan) sebesar Rp. 48.592.221.203,- terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 37.664.381.200,- untuk pembiayaan 11 program pembangunan mencakup 25 kegiatan BPMPD tahun 2016, dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 10.927.840.003,- untuk pos gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai BPMPD. Selain itu terdapat juga Belanja Tidak Langsung berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, dan hibah yang pengelolaannya di Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dimana bantuan dimaksud dialokasikan untuk :

1. Kegiatan Penunjang Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

- a. Penyelenggaraan BBGRM Tk. Provinsi, Bantuan Keuangan Kab/Kota Rp 180,000,000
 - b. Fasilitas Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Kab/Kota Rp 1.000,000,000
2. Penunjang Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TMMD dan BSMSS.
 - a. TMMD, Bantuan Keuangan untuk 10 Kab/Kota Rp 2.000,000,000,- masing – masing Kab/Kota Rp.200.000.000,-
 - b. BSMSS Bantuan Keuangan untuk 24 Kab/Kota Rp 2.400.,000,000,-
3. Bantuan Keuangan Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan tunjangan aparatur pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp. 345.865.000.000,- di distribusikan kepada 5.321 Desa, direalisasi sebesar Rp344.910.000.000,- dikarenakan jumlah desa sekarang berjumlah 5.313 desa serta disebabkan oleh ada beberapa desa yang tidak mencairkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur tingkat keberhasilan/kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran data kinerja kegiatan di lingkungan BPMPD dilakukan dengan menggunakan data kinerja yang diperoleh dari laporan hasil pelaksanaan kegiatan (data sekunder). Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan untuk mengukur efektivitas, efesiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT).

Untuk memperoleh hasil pengukuran yang mendekati hasil yang sebenarnya, digunakan dua rumus persentase pencapaian rencana tingkat capaian sebagai berikut :

1. Dalam kondisi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Dalam Kondisi semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

Skala Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
> 100	Sangat Baik
80 > 100	Baik
> 55 - 80	Sedang
< 55	Kurang

Dalam menetapkan indikator kinerja disesuaikan dengan substansi tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang holistik dan komprehensif, maka titik beratnya pada pelaksanaan kegiatan koordinasi,

sehingga indikator kinerja yang ditetapkan hampir tidak pernah terlepas dari lembaga eksternal yang berkaitan dengan BPMPD.

2. Kinerja Sasaran Strategik

Capaian kinerja program dan kegiatan BPMPD Tahun 2016 sebagai berikut :

3. Evaluasi Dan Realisasi Anggaran

Selanjutnya atas dasar hasil perhitungan dilakukan analisis dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dalam rangka pencapaian

pelaksanaan kegiatan mulai dari input, output dan outcome, nilai akhir dari seluruh kegiatan di lingkungan BPMPD diperoleh hasil 87,70% dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI BELANJA BPMPD PROVINSI JAWA BARAT T.A. 2016
(SUMBER DANA APBD)

BELANJA	DPA T.A 2016 (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN	% REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS)	10.927.840.003,-	10.605.660.858,-	322.179.145,-	97,05
BELANJA LANGSUNG	37.664.381.200,-	33.030.490.451,00	4.633.890.749,00	87,70
JUMLAH	48. 592.221.203,-	43.636.151.309,-	4.956.069.894,-	89,80

RINCIAN BELANJA LANGSUNG DANA APBD DAN REALISASI KEUANGAN
PERKEGIATAN DI BPMPD TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) 2016	SISA ANGGARAN	%
I	Program Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	900.000.000,00	869.633.513,00	30.366.487,00	96,63
1	Perencanaan program dan kegiatan BPMPD	900.000.000,00	869.633.513,00	30.366.487,00	96,63
II	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	3.8000.000.000,00	3.125.822.300,00	674.177.700,00	82,26
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dakam mendukung Pembangunan Desa	3.800.000.000,00	3.125.822.300,00	674.177.700,00	82,26
III	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1.500.000.000,00	1.111.057.800,00	388.942.200,00	74,07
3	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPMPD	1.500.000.000,00	1.111.057.800,00	388.942.200,00	74,07
IV	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.169.751.200,00	1.942.551.468,00	227.199732,00	89,53
4	Pelayanan Administrasi Kantor BPMPD	2.169.751.200,00	1.942.551.468,00	227.199732,00	89,53

V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.753.200.000,00	1.651.780.050,00	101.419.950,00	94,22
5	Peningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor BPMPD	1.753.200.000,00	1.651.780.050,00	101.419.950,00	94,22
VI	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.000.000.000,00	1.609.776.559,00	390.223.441,00	80,49
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPMPD	2.000.000.000,00	1.609.776.559,00	390.223.441,00	80,49
VII	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	100.000.000,00	91.580.000,00	8.420.000,00	91,58
7	Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPMPD Provinsi Jawa Barat	100.000.000,00	91.580.000,00	8.420.000,00	91,58
VIII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	345.000.000,00	243.081.150,00	101.918.850,00	70,46
8	Penyusunan Dokumen Rencana, Evaluasi, dan Pelaporan Internal BPMPD	95.000.000,00	42.150.000,00	52.850.000,00	44,37
9	Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan	250.000.000,00	200.931.150,00	49.068.850,00	80,37
IX	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	18.198.430.000,00	16.726.996.300,00	1.469.433.700,00	91,92
10	Peran kelembagaan Desa dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Perdesaan	750.000.000,00	616.432.650,00	133.567.350,00	82,19
11	Pembinaan Posyantek dan Wartek serta Gelar Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional	959.000.000,00	920.059.100,00	38.940,00	95,94
12	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Posyandu di Desa dan Kelurahan	11.533.955.000,00	11.132.007.993,00	401.947.007,00	96,52

13	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	900.000.000,00	651.301.096,00	248.698.904,00	72,37
14	Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat	250.000.000,00	221.865.120,00	28.134.880,00	88,75
15	Penguatan Lembaga Perekonomian Perdesaan	1.150.000.000,00	1.034.454.276,00	115.545.724,00	89,95
16	Sinkronisasi Penanggulangan masalah kemiskinan di Perdesaan	400.000.000,00	337.030.948,00	62.969.052,00	84,26
17	Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	350.000.000,00	344.498.864,00	5.501.136,00	98,43
18	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa dan Kelurahan	800.000.000,00	673.562.750,00	126.437.250,00	84,20
19	Pengelolaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Standarisasi Pelatihan)	400.000.000,00	337.030.948,00	62.969.052,00	84,26
20	Peningkatan Pemasaran Produk Perekonomian Perdesaan	853.475.000,00	671.903.503,00	181.571.497,00	78,73
X	Program peningkatan dan pembinaan peranserta masyarakat dalam pembangunan	2.750.000.000,00	2.291.593.278,00	458.406.722,00	83,33
21	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2.750.000.000,00	2.291.593.278,00	458.406.722,00	83,33
XI	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	4.150.000.000,00	3.366.618.033,00	783.381.967,00	81,12
22	Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	1.250.000.000,00	1.165.288.565,00	84.711.435,00	93,22

23	Sinergitas Penguatan Peran Pemerintah Desa dan Gubernur Ngamumule Lembur (GNL)	1.250.000.000,00	1.165.288.565,00	84.711.435,00	93,22
24	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung tata Kelola Keuangan Desa (SIMKEUDES)	900.000.000,00	299.613.050,00	600.386.950,00	33,29
25	Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Profil Desa/Kelurahan	750.000.000,00	662.135.500,00	87.864.500,00	88,28
	JUMLAH	37.664.381200,00	33.030.490.451,00	4.633.890749,00	87,70

**PERBANDINGAN BELANJA LANGSUNG DANA APBD DAN REALISASI KEUANGAN
PERKEGIATAN DI BPMPD TA. 2015 DENGAN 2016**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (Rp) 2015	REALISASI (Rp) 2016	KET
I	Program Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	199.319.050,00	900.000.000,00	
1	Perencanaan program dan kegiatan BPMPD	199.319.050,00	900.000.000,00	Bertambah karena kegiatan lebih banyak dilakukan Tahun 2016
II	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	2.770.237.350,00	3.8000.000.000,00	
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mendukung Pembangunan Desa	2.770.237.350,00	3.800.000.000,00	Tahun 2015 kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah Desa
III	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	714.376.570,00	1.500.000.000,00	
3	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPMPD	714.376.570,00	1.500.000.000,00	Bertambah karena alokasi sub kegiatannya meningkat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (Rp) 2015	REALISASI (Rp) 2016	KET
IV	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.770.858.512,00	2.169.751.200,00	
4	Dukungan Administrasi dan Operasional Perkantoran BPMPD	1.770.858.512,00	2.169.751.200,00	Bertambah karena alokasi sub kegiatannya meningkat
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.927.848.400,00	1.753.200.000,00	
5	Peningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor BPMPD	1.927.848.400,00	1.753.200.000,00	Berkurang karena alokasi sub kegiatannya mengecil
VI	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.114.377.869,00	2.000.000.000,00	
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPMPD	1.114.377.869,00	2.000.000.000,00	Bertambah karena alokasi sub kegiatannya meningkat
VII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	124.902.298,00	345.000.000,00	Bertambah karena ada kegiatan baru
7	Penyusunan Dokumen Rencana, Evaluasi, dan Pelaporan Internal BPMPD	37.568.150,00	95.000.000,00	Bertambah karena alokasi sub kegiatannya meningkat
8	Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan	87.334.148,00	250.000.000,00	Ganti nama kegiatan, tahun 2015 : Verifikasi dan Evaluasi Bantuan/ hibah untuk Desa
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	17.383.573.506,00	18.198.430.000,00	
9	Peran kelembagaan Desa dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Perdesaan	172.020.000,00	750.000.000,00	Bertambah karena alokasi sub kegiatannya meningkat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (Rp) 2015	REALISASI (Rp) 2016	KET
10	Pembinaan Posyantek dan Wartek serta Gelar Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional	1.093.653.500,00	959.000.000,00	- Efisiensi Kegiatan - Penambahan nama Pembinaan Posyantek dan Wartek
11	Penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu (SIP)	1.125.913.000,00	-	Kegitan 2016 tidak ada
12	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Posyandu di Desa dan Kelurahan	11.061.002.582,00	11.533.955.000,00	yang lalu nama kegiatan Revitalisasi Posyandu Multifungsi se-Jawa Barat
13	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	365.658.452,00	900.000.000,00	- Bertambah karena alokasi sub kegiatannya meningkat - Penggabungan dengan kegiatan Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (th 2015)
14	Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat	64.748.500,00	250.000.000,00	Th 2015 kegiatan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
15	Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	390.263.000,00	-	Kegiatan digabung dengan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
16	Pembinaan Ekonomi Masyarakat Miskin, sekitar Desa Hutan dan Desa Sekitar Pesisir	311.864.000,00	-	Kegitan 2016 tidak ada

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (Rp) 2015	REALISASI (Rp) 2016	KET
17	Penguatan Lembaga Perekonomian Perdesaan	288.832.250,00	1.150.000.000,00	Tahun 2015 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pasar Desa
18	Gera! Gelar Produk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)	158.222.000,00	-	Kegitan 2016 tidak ada
19	Sinkronisasi Penanggulangan masalah kemiskinan di Perdesaan	161.038.500,00	400.000.000,00	Tahun 2015 Kegiatan Mediasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan dalam menunjang MDGs
20	Penguatan Peran Pemerintah Desa Sepanjang DAS Citarum 0- 20 km	9.230.000,00	-	Kegitan 2016 tidak ada
21	Pendampingan Provinsi untuk program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM- MPd)	545.095.722,00	-	Kegitan 2016 tidak ada
22	Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	105.713.000,00	350.000.000,00	Bertambah karena alokasi sub kegiatannya meningkat
23	Pembinaan posyantek dan wartek	335.842.000,00	-	Kegiatan digabung dengan Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tk Provinsi dan Tk Nasional
24	Pengelolaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Standarisasi Pelatihan)	54.970.000,00		Tahun 2015 Kegiatan Pembentukan komite standar pelatihan (KSP)
25	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa dan Kelurahan	1.451.371.000,00	800.000.000,00	Tahun 2015 Kegiatan Pelatihan kader pemberdayaan Masyarakat (KPM)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (Rp) 2015	REALISASI (Rp) 2016	KET
IX	Program peningkatan dan pembinaan peranserta masyarakat dalam pembangunan	1.894.500.450,00	2.750.000.000,00	
26	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1.894.500.450,00	2.750.000.000,00	Bertambah karena alokasi sub kegiatannya meningkat
X	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	2.393.546.590,00	4.150.000.000,00	
27	Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	1.029.296.220,00	1.250.000.000,00	Tahun 2015 Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan tingkat Provinsi tahun 2015
28	Sinergitas Penguatan Peran Pemerintah Desa dan Gubernur Ngamumule Lembur (GNL)	1.124.412.000,00	1.250.000.000,00	Tahun 2015 Kegiatan Sinergitas pemerintah Provinsi dalam penguatan pemerintahan desa pasca Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
29	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung tata Kelola Keuangan Desa (SIMKEUDES)	-	900.000.000,00	Kegiatan baru tahun 2016
30	Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Profil Desa/Kelurahan	239.838.370,00	750.000.000,00	Bertambah karena alokasi sub kegiatannya meningkat Tahun 2015 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan.
	JUMLAH	30.293.540.595,00	33.030.490.451,00	

4. Evaluasi dan Analisis Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

(1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00,- realisasi anggaran sebesar Rp. 869.633.513,- (96,63%).
 - a. Output Kegiatan adalah
 - a) Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Pusat dan Daerah.
 - b) Terlaksananya Fasilitasi Pra Musrenbang Kewilayahan.
 - c) Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang.
 - d) Mengikuti Pra Musrenbangnas.
 - e) Terlaksananya Rakor Perencanaan dan ke PMD-an Tk. Pusat.
 - f) Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Fasilitasi Bidang PMD
 - g) Terlaksananya Forum Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat.
 - h) Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kegiatan BPMPD
 - b. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Koordinasi Pusat, Provinsi, dan Daerah.
 - c. Permasalahan
 - a) Masih adanya kegiatan yang rendah penyerapan anggarannya.
 - b) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan terlambatnya pengajuan permohonan SPP dan SPM
 - c) Adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
 - d. Solusi
 - a) Perlunya perencanaan program/kegiatan yang lebih matang dan mekanisme administrasi keuangan didalam pelaksanaannya harus sesuai serta mengikuti alur kas dan kurva S yang sudah ditetapkan dalam DPA.
 - b) Mengintensifkan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.
 - c) Melakukan sinergitas program/kegiatan antar bidang yang lebih optimal.

e. Dokumentasi Kegiatan

Pameran

Pembangunan LKPJ TA. 2015



Forum Padesaan





Penyerahan Cenderamata
Kepada Peserta Forum Padesaan oleh
Kepala BPMPD Provinsi Jawa Barat



Penyerahan Cenderamata
Kepada Peserta Forum Padesaan oleh
Wakil Gubernur Jawa Barat



Sambutan Forum Padesaan Oleh Wakil
Gubernur Jawa Barat



Pembukaan Forum Padesaan oleh Wakil
Gubernur Jawa Barat dengan ditandai
Pemukulan Gong



(2) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur BPMPD yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.111.057.800,- (74,07%).
 - a. Output Kegiatan
 - a) Peningkatan Kompetensi Aparatur BPMPD
 - b) Kebugaran Fisik bagi Pegawai BPMPD
 - c) Kesehatan Mental bagi Pegawai BPMPD
 - d) Penanaman Sikap Mental Disiplin dan Jiwa Korsa
 - b. Outcome Kegiatan adalah Tercapainya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pegawai.
 - c. Permasalahan
 1. Tidak terealisasinya bantuan biaya pendukung Diklatpim III dan IV.
 2. Terdapatnya sisa biaya Bimtek karena biaya perjalanan laur provinsi tidak disetujui di dalam pergeseran anggaran.
 - d. Solusi
Pendataan lebih awal kepada Pejabat Eselon II dan IV yang belum mengikuti Diklatpim; dan mengurangi anggaran biaya Bimtek pada tahun anggaran berikutnya
 - e. Dokumentasi Kegiatan





(3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Dukungan Administrasi dan Operasional Perkantoran BPMPD yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.169.751.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.942.551.468,- (89,53%).
 - a. Output Kegiatan
 - a) Ketatausahaan
 - b) Penyediaan ATK
 - c) Penggandaan Dokumen
 - d) Operasional Perkantoran
 - e) Koordinasi dan Konsultasi
 - f) Jasa Komunikasi, Listrik, Internet, dan Air
 - b. Outcome kegiatan adalah optimalnya pelayanan administrasi perkantoran, komunikasi, listrik dan air
 - c. Permasalahan
 1. Terdapat sisa biaya listrik, air dan telephone
 2. Tidak disetujui pergeseran anggaran
 - d. Solusi

Telah dilaksanakan penghematan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

(4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPMPD yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.753.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.651.780.050,- (94,22 %).
 - a. Output Kegiatan
 - a) Detail Engineering Design (DED) gedung kantor BPMPD
 - b) Meja kerja staf
 - c) Software Office
 - d) Software Antivirus
 - e) Sound System
 - f) Kendaraan Roda Empat

- b. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya kualitas sarana dan prasarana sesuai kerja yang memadai
- c. Permasalahan
Tidak terdapat permasalahan, sisa anggaran adalah sisa negoisasi dengan pihak kedua.
- d. Solusi
-
- e. Dokumentasi Kegiatan



(5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPMD yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.609.776.559,- (80,49 %).
 - a. Output Kegiatan
 - a) Pemeliharaan Taman Kantor
 - b) Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Jaringan Air
 - c) Pemeliharaan Telepon dan Komputer
 - d) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
 - e) Pelaburan Gedung dan Bangunan Kantor
 - f) Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor
 - b. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BPMPD.

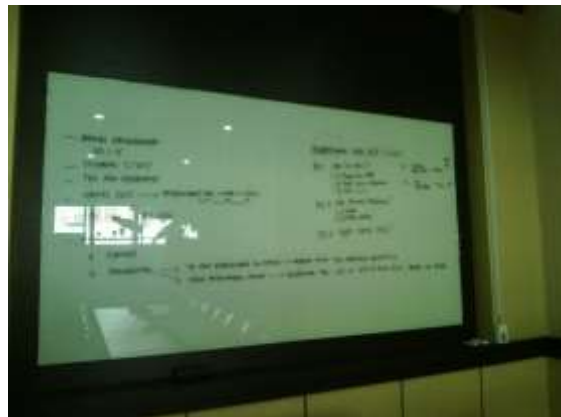
c. Permasalahan

Tidak terdapat permasalahan, sisa anggaran adalah sisa belanja perawatan kendaraan bermotor dan pembatalan pembelian lampu jalan.

d. Solusi

Efisiensi perawatan kendaraan dan lebih selektif dalam pembelian barang

e. Dokumentasi Kegiatan



(6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana, Evaluasi, dan Pelaporan Internal BPMPD yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 42.150.000,- (44,37%).

a. Output Kegiatan

- a) Tersusunnya dokumen perencanaan BPMPD
- b) Review Renstra dan Renja

- b. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan BPMPD

c. Permasalahan

- a) Anggaran Makanan dan Minuman rapat sebagian tidak diserap karena sudah terpenuhi dan dilakukan efisiensi.

- b) Efisiensi didalam penggunaan anggaran penggandaan dan fotocopy.
 - d. Solusi
 - Perencanaan anggaran Makan dan minum rapat dan anggaran penggandaan sesuai dengan kebutuhan.
2. Kegiatan Evaluasi dan Verifikasi Bantuan/Hibah yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.200.931.150,- (80,37%)
- a. Output kegiatan
 - a) Tersusunnya dokumen permohonan bantuan/hibah
 - b) Tersusunnya laporan evaluasi bantuan/hibah
 - b. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan BPMPD.
 - c. Permasalahan
 - a) Anggaran makanan dan minuman rapat sebagian tidak diserap karena sudah terpenuhi dan dilakukan efisiensi
 - b) Efisiensi didalam penggunaan anggaran penggandaan dan fotocopy
 - d. Solusi
 - Perencanaan anggaran makanan dan minuman rapat dan anggaran penggandaan sesuai dengan kebutuhan.

(7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

- 1. Kegiatan Peningkatan Pemasaran Produk Perekonomian Perdesaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 853.475.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 671.903.503,- (78,73%).
 - a. Output Kegiatan adalah :
 - a) Konsolidasi peningkatan pemasaran Perekonomianmasyarakat
 - b) Pameran produk pemasaran perdesaan
 - c) Fasilitasi pemasaran produk perdesaan berbasis teknologi informasi
 - b. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan.
 - c. Permasalahan
 - Penyerapan anggaran sebesar 79% dari target 100%
 - d. Solusi
 - a) Sisa penyerapan dikembalikan ke Kas Daerah yang merupakan efisiensi anggaran.
 - b) Hasil nego kegiatan pameran dan perjalanan dinas
 - e. Dokumentasi Kegiatan

Rapat Koordinasi
Pemasaran Produk Perekonomian Perdesaan



Pameran
Pemasaran Produk Perekonomian Perdesaan



2. Kegiatan Sinkronisasi Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Perdesaan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 337.030.948,- (84.26 %).

a. Output

- a) Rakor Penanggulangan Kemiskinan;
- b) Monev dan data Sinkronisasi Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
- c) Benchmarking

b. Outcome

Adalah meningkatnya peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pengentasan kemiskinan.

c. Permasalahan

Penyerapan anggaran sebesar 84 % dari target 100 %

d. Solusi

Sisa penyerapan dikembalikan ke kas daerah yang merupakan efisiensi anggaran dari kegiatan benchmarking dan perjalanan dinas.

e. Dokumentasi Kegiatan

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan



Benchmarking Sinkronisasi Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Pedesaan Tahun 2016



3. Kegiatan Penguatan Lembaga Perekonomian Perdesaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.034.454.276,- (89,95%).
 - a. Output Kegiatan
 - a) Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Desa;
 - b) FGD Kelembagaan perekonomian Masyarakat;
 - c) Piloting BUMDesa Unggulan;
 - d) Fasilitasi cadangan pangan pemerintahan desa.
 - b. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan pengelolaan BUMDes dan Pasar Desa.
 - c. Permasalahan
Penyerapan anggaran sebesar 90 % dari target 100 %
 - d. Solusi
Sisa penyerapan dikembalikan ke Kas Daerah yang merupakan efisiensi anggaran dari hasil nego dan sisa kegiatan benchmarking.

e. Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Rapat Koordinasi
Fasilitasi Cadangan Pangan Pemerintahan Desa
Kegiatan Penguatan Lembaga Perekonomian Perdesaan



Rapat Koordinasi Focus Group Discussion (FGD)
Kelembagaan Perekonomian Masyarakat



4. Kegiatan Peran Kelembagaan Desa dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Pedesaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 616.432.650,- (82,19 %).

- a. Output
 - a) FGD Rumah Tidak Layak Huni
 - b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- b. Outcome kegiatan adalah Tersusunnya model Rutilahu di Jawa Barat
- c. Permasalahan
 - a) Program rehab Rutilahu terhenti disebabkan oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 298 ayat 5 dan SE Mendagri Nomor 900/4627/SJ tanggal 18 September 2015 tentang Penajaman Ketentuan pasal 298 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa bantuan hibah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sehingga hibah kepada masyarakat Tahun Anggaran 2016 tidak ada.
 - b) CPCL Perbaikan Rutilahu Tahun 2014 yang sudah mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) belum terealisasi;
 - c) Perjalanan dinas luar Provinsi /Pusat tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada bantuan hibah yang perlu dikonsultasikan dan dilaporkan.
- d. Solusi

Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan program perbaikan Rutilahu dengan melakukan percepatan pelaksanaan perbaikan Rutilahu bekerjasama dengan TNI AD /KODAM III Siliwangi dan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
- e. Dokumentasi Kegiatan



5. Kegiatan Pembinaan Posyantek dan Wartek serta Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 959.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 920.059.100,- (95,94 %).
 - a. Output Kegiatan
 - a) Terselenggaranya Gelar TTG Tingkat Provinsi Jawa Barat VI.
 - b) Keikutsertaan Provinsi Jawa Barat pada Gelar TTG Tingkat Nasional XVIII di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - c) Revitalisasi Posyantek;
 - d) Pelaksanaan Rapat Teknis Kegiatan TTG;
 - e) Rapat Evaluasi Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
 - b. Outcome kegiatan
 - a) Meningkatnya kemitraan penemu (inventor), pengguna/pemanfaat TTG dan Pengusaha.
 - b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan teknologi.
 - c. Permasalahan

Bankek Kabupaten untuk Revitalisasi Posyantek untuk 27 Kab/Kota hanya terserap 10 Kabupaten, disebabkan anggaran ada di triwulan IV (APBD-Perubahan), sehingga tidak semua Kabupaten/Kota memasukkan anggaran Banprov di APBD.
 - d. Solusi

Bantuan keuangan harus dianggarkan pada anggaran murni dan dapat tersosialisasikan ke daerah.
 - e. Dokumentasi Kegiatan

Pelaksanaan Acara Widya Wisata ke Wilayah Bandung Barat dan meninjau salah satu Posyantek "Mitra Mandiri"



Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi
Halaman Gedung Sate



Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional KE XVIII
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2016
Lokasi : Kawasan Islamic Centre Hubbul Wathan – Kota Mataram



6. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 344.498.864,- (98,43%).
 - a. Output Kegiatan
 - a) Terlaksananya rakor
 - b) Terlaksananya pembinaan
 - b. Outcome kegiatan adalah terjadinya sinergitas antara Tim AMPL
 - c. Permasalahan
 - a) Kelembagaan: KP-SPAM (Kelompok pengelolaan-sarana pengelolaan air minum) belum optimal dalam melakukan pengelolaan sarana air minum.
 - b) Masyarakat pengguna belum memahami tentang iuran dan Sambungan Rumah (SR) tidak pakai Water meter dan pembayaran iuran tidak rutin;
 - c) Teknis: pipa rusak, genset dan pompa rusak, sumber air mengecil (bahkan hilang)
 - d) Keuangan: Iuran yang terkumpul masih belum mampu membiayai operasional dan pengelolaan (O&P) (Iuran <BOP).
 - d. Solusi
 - a) BPMPD selaku PPMU maupun anggota pokja AMPL didalam keberlanjutan pasca program melakukan Rakor Pokja AMPL tiap tahun selama masa program
 - b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sarana Air Minum di Desa, untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sarana air minum di desa, termasuk penanganan kerusakan ringan : pipa, genset dan pompa air
 - c) Melakukan pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui permasalahan di lapangan untuk bahan tindak lanjut perbaikannya.
 - d) Keuangan : Secara berjenjang melakukan sosialisasi tentang pentingnya iuran oleh pengguna sarana terkait pengelolaan SPAM (O&P) bagi keberlanjutan sarana penyediaan air minum khususnya program PAMSIMAS.

e. Dokumentasi Kegiatan



7. Kegiatan Pengelolaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Standar Pelatihan) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 123.880.000,- (49,55%).

a. Output Kegiatan

- a) Rapat-rapat Komite Standar pelatihan (KSP) Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- b) Rapat pengembangan Komite standar pelatihan (KSP) Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

b. Outcome

Terbentuknya Komisioner KSP

c. Permasalahan

Keterlambatan dalam proses pembuatan Surat Keputusan sehingga di Tahun 2016 baru bias terbentuk Komisioner KSP.

d. Solusi

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Jawa Barat

e. Dokumentasi Kegiatan

Rapat Panitia Seleksi Komisi Standar Pelatihan (KSP)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
Provinsi Jawa Barat



Seleksi Wawancara Calon Komisioner Komisi Standar Pelatihan (KSP)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat



8. Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 673.562.750,- (84,20%).

a. Output kegiatan

meningkatnya Pembina Kader pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat

b. Outcome

Meningkatnya kapasitas Pembina Kader Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

c. Permasalahan

Tidak ada

d. Solusi

Tidak ada

e. Dokumentasi Kegiatan

Pembina Kader Pemberdayaan Masyarakat



9. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI Manunggal membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan Bulan Bhakti Gotong Royong yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 651.301.096,- (72,37%).

a. Output Kegiatan

1. Rakor TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)

2. Fasilitasi kegiatan Manunggal membangun Desa (TMMD) ke 96

3. Fasilitasi kegiatan Manunggal membangun Desa (TMMD) ke 97
4. Fasilitasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
5. Rapat evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
6. Penilaian Lomba BBGRM terbaik Tingkat Provinsi
7. Pelaksanaan Penilaian Lomba BBGM Tingkat Nasional
8. Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi
9. Pencanangan BBGRM Tingkat Nasional
- b. Outcome Kegiatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Kegiatan BBGRM, TMMD, dan BSMSS.
- c. Permasalahan
Kegiatan Tingkat Nasional dibatalkan karena di Kementerian Dalam Negeri terjadi optimalisasi anggaran
- d. Solusi
Koordinasi jadwal ke Kementerian Dalam Negeri
- e. Dokumentasi Kegiatan

Rapat Koordinasi Teknis
TNI Manunggal Membangun Desa ke-96



Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIII Tk. Provinsi





Rapat Koordinasi Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
Provinsi Jawa Barat



10. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 221.865.000,- (88,75%).

- a. Output
 1. terlaksananya kegiatan penyusunan pedoman pengembangan adat di Jawa Barat.
 2. Terlaksananya peningkatan kapasitas aparaturnya Kabupaten/Kota dalam pengakuan hak asal usul dan hak tradisional.
 3. Terlaksananya supervise pengakuan Hak asal usul dan tradisional.
- b. Outcome

-
- c. Permasalahan

Pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, susunan kelembagaan, pengisian jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi, sedangkan pada pasal 98 , Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Solusi

Hasil koordinasi dengan Biro Hukum diarahkan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Masyarakat Adat.
- e. Dokumentasi Kegiatan

**STUDY KOMPARATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DAN DESA ADAT
KE PROVINSI BALI
TAHUN 2016**

Kunjungan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





STUDY KOMPARATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DAN DESA ADAT KE PROVINSI BALI TAHUN 2016

Kunjungan ke Desa Pakraman/Adat Renon



11. Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.462.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.

1.125.913.000,- (76,99%). Output kegiatan Terlaksananya Penilaian Posyandu Terbaik Tk. Kabupaten/Kota Tahap I, Grand Final Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi Tingkat Provinsi, Pertemuan Kebijakan Pusat, Rakornas dan Konsultasi ke Pusat, Penghargaan Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tk. Provinsi Jawa Barat, Outcome Meningkatnya kinerja posyandu.

Dokumentasi Kegiatan



12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Posyandu di Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.533.955.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.11.132.007.993,- (96,52%).

a. Output kegiatan

- 1) Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Revitalisasi Posyandu.
- 2) Peningkatan Kinerja Pendamping Kader
- 3) Peningkatan kapasitas PKP
- 4) Pertemuan Semesteran PKP;
- 5) Publikasi kegiatan posyandu;
- 6) Lomba Kreativitas PKP;
- 7) Revitalisasi Posyandu Award;
- 8) Supervisi Pengembangan Posyandu;
- 9) Benchmarking;
- 10) Rapat evaluasi PKP;

- 11) Penilaian Posyandu Terbaik Kab/Kota tahap I;
 - 12) Pelatihan Materi Sosialisasi Posyandu bagi Penyiar;
 - 13) TOT Posyandu;
 - 14) Pembinaan Posyandu Model.
- b. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Strata Posyandu di Jawa Barat
 - c. Permasalahan Adanya efisiensi anggaran
 - d. Solusi Adanya penghematan anggaran
 - e. Dokumentasi Kegiatan

PERTEMUAN SEMESTERAN PKP TAHUN 2016



LOMBA KREATIFITAS PENDAMPING KADER POSYANDU (PKP) TAHUN 2016





(8) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

1. Kegiatan Sinergitas Penguatan Peran Pemerintah Desa dan Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.165.288.565,- (93,22 %),
 - a. Output Kegiatan
 - 1) Terlaksananya Sosialisasi;
 - 2) Terlaksananya, Workshop,
 - 3) Terlaksananya Gubernur Ngamumule Lembur (GNL);
 - 4) Pergub penguatan Pemerintahan Desa
 - b. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap aplikasi SIMKEUDES.
 - c. Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan sinergitas Pemerintahan Provinsi dalam Penguatan Pemerintahan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah keterbatasan waktu pelaksanaan baik kegiatan Gubernur Ngamumule Lembur, Desa Laboratorium Sinergitas dan Workshop Pengelolaan Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa dikarenakan berbarengan dengan kegiatan Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 - d. Solusi

Memaksimalkan waktu pelaksanaan kegiatan dan sebagian alokasi anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

e. Dokumentasi Kegiatan

Gubernur Ngamumule Lembur ke IV
Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang



Gubernur Ngamumule Lembur ke V
Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu



2. Kegiatan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Profil Desa /Kelurahan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 662.135.500,- (88,28%).
- a. Output Kegiatan
- 1) Bimbingan teknis Aplikasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan;
 - 2) Pembinaan Profil desa dan Kelurahan.
 - 3) Benchmarking
- b. Outcome Kegiatan
- Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
- c. Permasalahan
- 1) Kurangnya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten/Kota dalam menunjang kegiatan Profil Desa/Kelurahan
 - 2) Kurangnya dukungan sarana (software computer) untuk pengelolaan data di tingkat desa/kelurahan
 - 3) Rendahnya kemampuan para pengolah data profil desa/kelurahan khususnya di tingkat desa/kelurahan.
 - 4) Kurangnya kesadaran dan tanggungjawab para pengelola profil desa/kelurahan tentang pentingnya profil desa/kelurahan sebagai keputusan bersama.
 - 5) Letak geografis yang belum terjangkau oleh akses internet.
 - 6) Sering bergantinya petugas operator karena pergantian kepala desa
 - 7) Petugas operator tidak diberikan surat keputusan atas pekerjaannya yang mengakibatkan kurang jelasnya pekerjaan yang harus ditangani;
 - 8) Kepala Desa masih beranggapan pekerjaan mengisi data profil belum menjadi kewajiban.
- d. Solusi
- 1) Lebih mengoptimalkan penyampaian informasi dan sosialisasi terkait pengentrian data profil desa dan kelurahan
 - 2) Menjaga komunikasi dan koordinasi secara intensif terkait profil desa dan kelurahan baik antar pelaksana di tingkat desa/kelurahan, Pemerintah Kota/Kabupaten, pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat.

e. Dokumentasi Kegiatan
Bimbingan Teknis Aplikasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
Kabupaten Bogor



Bimbingan Teknis Aplikasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
Kota Tasikmalaya



3. Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.235.580.918,- (99,17 %).

a. Output Kegiatan

- 1) Penilaian lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016
- 2) Persiapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2016
- 3) Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan

b. Outcome

Terlaksananya evaluasi hasil program pembangunan Pemerintahan dengan Masyarakat, baik dalam partisipasi maupun keswadayaan

c. Permasalahan

- 1). Permasalahan yang timbul pada saat pengumpulan dan pengolahan data, dari permasalahan yang timbul yang dialami oleh beberapa desa dan kelurahan pada saat pengumpulan data dapat terbagi menjadi permasalahan di kelurahan, antara lain :

- Kurangnya pemahaman aparat desa/kelurahan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data (data yang ada dalam profil)
- Faktor lemahnya komunikasi dan intensitas kelurahan dan SKPD terkait dalam pembinaan maupun dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan SKPD terkait;
- Data kurang sinkron antara data kelurahan dengan data Instansi terkait
- Tidak terinventarisasinya data atau dokumen secara tertulis.

Sedangkan permasalahan yang dialami oleh Desa, antara lain :

- Masih lemahnya administrasi secara umum yang baik karena belum ada sosialisasi permendagri yang baru;
- Belum ada pelatihan khusus mengenai Lomba Desa dengan mengaplikasikan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang dimulai dengan evaluasi diri terlebih dahulu;
- Permasalahan yang muncul pada saat pengumpulan data dan pengolahan data adalah aturan yang baru diterima dan belum terlalu dipahami sehingga terjadi keterlambatan dalam penerapannya.

- 2). Permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa :

Permasalahan yang dihadapi oleh Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang dihadapi oleh desa adalah :

- Permasalahan di desa yang masyarakatnya heterogen dan penduduk yang padat sehingga memerlukan pemikiran yang ekstra untuk menangani semua keinginan warga masyarakat yang sangat variatif. Ini menuntut keahlian seorang Kepala desa yang kreatif dan konsen terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- Permasalahan lokasi desa yang relative jauh dan sarana prasarana jalan tidak memadai, mengakibatkan transportasi orang, barang dan jasa akan mengalami keterlambatan.

Permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kelurahan :

Permasalahan yang dialami oleh desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat berbeda, permasalahan yang dihadapi oleh kelurahan adalah :

- Karena kelurahan belum merupakan SKPD maka kelurahan tidak dapat menganggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kelurahan sehingga kebutuhan-kebutuhan sesuai yang diharapkan masyarakat melalui Rencana Pembangunan jangka menengah Kelurahan (RPJMK) dan anggaran masih menginduk pada Kecamatan;
- Banyak usulan pembangunan yang tidak terakomodir dalam usulan Musrenbang;
- Banyak program kegiatan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya tidak terkoordinasi dengan kelurahan;
- Kurang personil/sumber daya manusia terbatas, disbanding dengan pekerjaan yang relative variatif

d. Solusi

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara lain :

- 1) Ada regulasi yang memungkinkan fleksibilitas anggaran untuk di kelurahan dalam menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan sehingga kebutuhan-kebutuhan sesuai yang diharapkan masyarakat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)
- 2) Mengajukan kembali program usulan pada tahun berikutnya dan mencari dana aspirasi dewan sesuai daerah pilihan;
- 3) Meningkatkan pembinaan kepada aparatur desa dan Lembaga Desa;
- 4) Mengadakan Bimbingan Teknis khusus tentang Permendagri yang baru tentang Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.

Upaya Pemecahan masalah di Kelurahan :

- 1) Ada regulasi yang memungkinkan fleksibilitas anggaran untuk di kelurahan dalam menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Kelurahan sehingga kebutuhan-kebutuhan sesuai yang diharapkan masyarakat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)

- 2) Adanya pembinaan dari BPMKB bersama-sama dengan unsur terkait lainnya untuk tertib administrasi bagi kelurahan dengan mangisi 17 jenis buku administrasi Kelurahan.
- 3) Adanya pembinaan dan updating data profil kelurahan yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali dengan mengundang Lurah, Operator untuk proses up dating data sesuai dengan Buku Laporan tahunan Kelurahan.

e. Dokumentasi Kegiatan



4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Tata Kelola Keuangan Desa (SIMKEUDES) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 299.613.050,- (33,29%).

a. Output Kegiatan

- 1) Terlaksana workshop SIMKEUDES;
- 2) Terlaksananya visitasi pelaksanaan SIMKEUDES.

- b. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pemahaman Aparatur Desa terhadap SIMKEUDES.

c. Permasalahan

- 1) Belum memahaminya Aparatur Pemerintah Desa dalam mengoperasikan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Simkeudes) khususnya Bendahara Desa, Kasi Kecamatan dan OPD yang menangani Desa.
- 2) Masih banyak Kepala Desa yang belum mengetahui Tata Kelola Keuangan Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Simkeudes)
- 3) Tata Kelola Keuangan desa dengan menggunakan Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Aplikasi Simkeudes) belum tersosialisasikan dengan menyeluruh.

d. Solusi

- 1) Diperlukannya workshop Tata Kelola Keuangan Desa (Simkeudes) khususnya bagi peserta yang diantaranya adalah Bendahara Dea, Kasi Pemberdayaan/Pemerintahan di Kecamatan dan OPD Kabupaten yang ada di wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan menyeluruh.
- 2) Diperlukan sosialisasi mengenai Sistem Keuangan Desa (Simkeudes) dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang bertujuan Kepala Desa agar mengetahui bahwa keuangan desa harus menggunakan apalikasi tersebut;
- 3) Anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Mendukung Tata kelola Keuangan Desa (Simkeudes) sebaiknya ditambah supaya dalam pelaksanaan menginformasikan di kegiatan workshop Tata kelola Keuangan desa (Simkeudes), Aplikasi Simkeudes dalam menentukan jumlah pesertanya tidak terbatas seperti tahun sebelumnya.

e. Dokumentasi Kegiatan

Workshop Tata Kelola Keuangan Desa (SIMKEUDES)
Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu





(9) Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.800.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.125.822.000,- (82,26 %).

- a. Output Kegiatan adalah penjelasan teknis peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa.
- b. Outcome kegiatan adalah terfahaminya Sekretaris desa dalam peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan tunjangan penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa.

- c. Permasalahan.

Dalam hal proses pencairan Bantuan Keuangan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa, beberapa menemui kendala sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan keuangan yang dimaksud, hal ini terjadi karena

- 1) Nomor rekening Pemerintah Desa tidak jelas, sudah tidak aktif atau kepemilikan bukan atas nama Pemerintah Desa melainkan milik pribadi;
- 2) Masih terdapat kesalahan dalam penulisan nominal bantuan di APBDesa atau sama sekali tidak mencantumkan bantuan keuangan dimaksud pada APBDesa.
- 3) Beberapa persyaratan lupa dibubuhi cap desa dan tanda tangan kepala desa

- d. Solusi

Dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan diantaranya :

- 1) Melakukan koordinasi secepatnya dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait permasalahan yang ada;
- 2) Memaksimalkan pembinaan ke desa

e. Dokumentasi Kegiatan

Penjelasan Teknis Bantuan Keuangan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam
Mendukung Pembangunan Desa



(10) Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.291.593.278,- (83,33 %).

a. Output kegiatan

- 1) Kegiatan Sekretariat
- 2) Kegiatan Pokja I
- 3) Kegiatan Pokja II
- 4) Kegiatan Pokja III
- 5) Kegiatan Pokja IV

b. Outcome kegiatan adalah terlaksananya 10 program pokok PKK yaitu :

- 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- 2) Gotong royong
- 3) Pangan
- 4) Sandang
- 5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- 6) Pendidikan dan Keterampilan
- 7) Kesehatan

- 8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- 9) Kelestarian Lingkungan Hidup
- 10) Perencanaan Sehat
- c. Permasalahan
 - Adanya efisiensi anggaran
- d. Solusi
 - Adanya penghematan anggaran
- e. Dokumentasi Kegiatan

PEMBINAAN POSYANDU BERPRESTASI TAHUN 2016



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran BPMPD Provinsi Jawa Barat yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran adalah sebesar 87,70% (**baik**).

Tingkat capaian kinerja BPMPD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 tersebut dihitung berdasarkan persentase rata – rata capaian sasaran baik, yaitu :

1. Keberhasilan

- a. Sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, kehidupan sosial budaya dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat.

Pencapaian kinerja sasaran ini mencapai **85,6%**, hanya 1 indikator sasaran yaitu persentase desa yang melaksanakan gotong royong, yang mencapai realisasi sesuai target **100%**, sedangkan 3 indikator sasaran lainnya tidak mencapai target yang diharapkan.

- b. Sasaran meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pencapaian kinerja sasaran kinerja ini mencapai **81%** diperoleh dari 1 indikator sasaran yaitu persentase desa yang memiliki wartek mencapai **100%**, sedangkan indikator sasaran persentase desa yang telah memanfaatkan sumber daya alam berwawasan lingkungan hanya mencapai **62%**.

2. Kegagalan

Sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber ekonomi.

Kinerja sasaran ini hanya mencapai **42,1%** dikarenakan indikator sasaran persentase desa yang BUMDES nya telah memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat hanya mencapai **34,20%**, sedangkan indikator sasaran persentase desa yang memiliki pasar desa pencapaian kinerjanya juga rendah yaitu hanya mencapai **50%**.

3. Permasalahan

- a. Dalam upaya melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditemukan hambatan berupa adanya kecenderungan mudarnya sistem nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap dan perilaku masyarakat yang diindikasikan dengan berkurangnya tingkat partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan khususnya dikawasan perkotaan.
- b. rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam termasuk dalam mendayagunakan teknologi tepat guna
- c. masih banyaknya desa-desa terisolir, terpencil dan kawasan yang tingkat aksesibilitasnya rendah terhadap sumber informasi dan sumber permodalan.
- d. Desa-desa di daerah perbatasan relatif belum terjangkau akses transportasi yang memadai.

B. Langkah Peningkatan Kinerja

Dilihat dari sisi capaian sasaran kinerja BPMPD Provinsi Jawa Barat mencapai 67,62% (**Sedang**), demikian pula dari sisi capaian kinerja keuangan mencapai 61,61% dari anggaran Non Fixed Cost yang dialokasikan. Artinya terdapat program/kegiatan yang perlu dikaji kembali efektivitasnya untuk mendukung capaian kinerja organisasi dan beberapa indikator masih perlu upaya peningkatan kinerja secara sistematis. Rencana peningkatan kinerja BPMPD Provinsi Jawa Barat sebagai langkah rencana tindak lanjut dituangkan dalam rencana aksi kinerja program kegiatan sebagai berikut :

